

ABSTRAK

Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT Sulawesi Resources Oleh Pemerintah (Studi Kasus Putusan Nomor 85/G/2025/PTUN.JKT), Pokok permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini yaitu : 1. Mengapa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat terhadap pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) PT Sulawesi Resources oleh pemerintah ? 2. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima terhadap pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) PT Sulawesi Resources oleh pemerintah?. Variabel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat terhadap pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) PT Sulawesi Resources oleh pemerintah. Alasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima terhadap pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) PT Sulawesi Resources oleh pemerintah. Sedangkan Variabel terikat adalah putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi oleh pemerintah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mana data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga penulis menyimpulkan bahwa: 1) alasan Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat terhadap pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) PT Sulawesi Resources oleh pemerintah karena: a) penerbit Objek Sengketa secara prosedur cacat yuridis. b) Perbuatan tergugat yang menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan pasal 177 Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara. c) Tindakan tergugat bertentangan dengan aspek kepastian hukum. 2) untuk mengetahui alasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima terhadap pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) PT Sulawesi Resources oleh pemerintah. pengadilan tinggi tata usaha negara adalah: penggugat belum menempuh upaya administrasi. Sedangkan Mahkamah Agung adalah: gugatan penggugat telah melewati waktu; Saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu: 1) Untuk subjek hukum orang atau badan hukum perdata, disarankan agar dalam menjalankan kegiatan usaha terutama dalam bidang pertambangan dapat melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku sehingga tidak berpotensi terjadinya pelanggaran. 2) Untuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, disarankan agar dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara wajib memperhatikan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Pencabutan Izin , Keputusan Tata Usaha Negara, Putusan Hakim.

ABSTRACT

This study examines the dispute resolution regarding the government's revocation of PT Sulawesi Resources' Production Operation Mining Business License (IUP OP) (Case Study: Decision Number 85/G/2025/PTUN.JKT). The core issues analyzed are: 1. Why did the Administrative Court judge grant the plaintiff's claim regarding the government's revocation of PT Sulawesi Resources' IUP OP? 2. Why did the High Administrative Court and the Supreme Court declare the plaintiff's claim inadmissible regarding the government's revocation of PT Sulawesi Resources' IUP OP? The variables employed in this study are independent and dependent variables. The independent variables are the reasons cited by the Administrative Court for granting the plaintiff's claim, and the reasons cited by the High Administrative Court and the Supreme Court for declaring the claim inadmissible. The dependent variable is the Administrative Court judge's decision regarding the government's revocation of the production operation mining business license. The study utilizes secondary data, comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the research findings, the author concludes that: 1) The Administrative Court granted the plaintiff's claim regarding the government's revocation of PT Sulawesi Resources' IUP OP because: a) the issuance of the object of the dispute was procedurally and legally flawed; b) the defendant's act of issuing the object of the dispute violated Article 177 of Government Regulation No. 96 of 2021 concerning the implementation of mineral and coal mining business activities; and c) the defendant's action violated the principle of legal certainty. 2) to determine the reasons why the High Administrative Court and the Supreme Court declared the lawsuit against the government's revocation of PT Sulawesi Resources' production operation mining business license (IUP OP) inadmissible. The High Administrative Court's reasoning was that the plaintiff had not exhausted administrative remedies, whereas the Supreme Court's reasoning was that the lawsuit was time-barred. The author offers the following suggestions: 1) Individuals or private legal entities engaged in business activities—particularly in the mining sector—are advised to fulfill their obligations in accordance with applicable legal regulations to avoid potential violations. 2) State administrative bodies or officials are advised to ensure that, when issuing state administrative decisions, they adhere to the relevant statutory provisions and the general principles of good governance.

Keywords: License Revocation, State Administrative Decision, Court Ruling.